

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Nagekeo membentang di antara 8°26'15'' LS - 8°64'40'' LS dan 121°6'20'' BT- 121°32'00'' BT. Kabupaten Nagekeo memiliki batas-batas wilayah geografis sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Ende
- b. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Ngada
- c. Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Flores
- d. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Sawu

4.1.2 Wilayah Administrasi

Secara Administrasi, Pemerintahan wilayah Kabupaten Nagekeo terbagi dalam 7 Kecamatan dan 113 Desa/Kelurahan dengan ibu kota adalah Mbay yang terletak di Kecamatan Aesesa.

Tabel 4.1
Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Nagekeo

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	Aesesa	6	12
2	Nangaroro	1	18
3	Boawae	8	19
4	Mauponggo	1	20
5	Wolowae		5
6	Keo Tengah		16
7	Aesesa Selatan		7
	Total	16	97

Sumber: BPS, Kabupaten Nagekeo

4.1.3 Demografis

Pada tahun 2020, populasi di Kabupaten Nagekeo mencapai 165.413 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 0,46%. Kepadatan penduduk di Kabupaten Nagekeo tergolong rendah, yakni sekitar 114 jiwa per kilometer persegi.

4.1.4 Topografis

Sebagian besar wilayah Kabupaten Nagekeo memiliki topografi berbukit, bergunung, dan berlembah. Wilayah tersebut ditandai oleh adanya lereng yang curam, terutama di sekitar daerah pantai.

- a. Sebanyak 29.863 hektar atau sekitar 17,24% dari total wilayah Kabupaten Nagekeo memiliki topografi ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut (dpl). Daerah ini mencakup sebagian besar pesisir pantai utara, sebagian daerah pesisir pantai selatan, dan pulau-pulau kecil lainnya. Tanahnya datar sampai landai, membuatnya sangat rentan terhadap pencemaran yang secara langsung terkait dengan air tanah yang cukup.
- b. Wilayah dengan ketinggian 25-100 meter dpl memiliki luas sekitar 20.843 hektar atau sekitar 12,03% dari total wilayah Kabupaten Nagekeo. Daerah ini merupakan kelanjutan dari daerah pesisir, sebagian besar berada di bagian utara Kabupaten Nagekeo, dengan sebagian kecilnya tersebar di bagian selatan dan pulau-pulau kecil lainnya.
- c. Topografi dengan ketinggian 100-500 meter dpl, mencakup luas 48.171 hektar atau sekitar 27,81% dari total wilayah Kabupaten Nagekeo. Ini melibatkan wilayah lereng atau kaki gunung, serta perbukitan yang

berfungsi sebagai daerah transisi dari dataran rendah ke dataran tinggi atau pegunungan.

- d. Wilayah dengan ketinggian 500-1000 meter dpl memiliki luas sekitar 70.216 hektar atau sekitar 40,54% dari total wilayah Kabupaten Nagekeo. Daerah ini merupakan wilayah pegunungan.
- e. Daerah dengan ketinggian lebih dari 1000 meter dpl mencakup 4.098 hektar atau sekitar 2,37% dari total luas wilayah Kabupaten Nagekeo. Wilayah ini merupakan daerah pegunungan atau dataran tinggi, hadir di beberapa kecamatan saja.

4.1.5 Iklim

Suhu udara di Kabupaten Nagekeo fluktuatif, berada dalam rentang 20°-34°C, sementara tingkat kelembapan nisbi berkisar antara 64%-84%. Kabupaten Nagekeo memiliki iklim sabana tropis (AW) yang mengalami dua musim, yakni musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau di wilayah ini umumnya berlangsung selama lebih dari 7 bulan, terutama dari April hingga November, dengan puncak kekeringan pada bulan Agustus. Sebaliknya, musim penghujan di Kabupaten Nagekeo biasanya singkat, terjadi pada periode bulan basah, yaitu Desember hingga Maret, dan mencapai puncaknya pada bulan Januari dengan curah hujan di atas 200mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah ini berkisar antara 800-1300mm per tahun, dan jumlah hari hujan bervariasi antara 60-130 hari hujan.

4.2 Profil Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Nageko. Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang langsung berada di bawah tanggung jawab Presiden. Sebelumnya, BPS berfungsi sebagai Biro Pusat Statistik yang didirikan sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 tahun 1960 tentang Statistik. Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan perundangan yang lebih baru, secara resmi, Biro Pusat Statistik mengubah namanya menjadi Badan Pusat Statistik. UU Nomor 16 tahun 1997 memperkenalkan beberapa materi baru sebagai bagian integral dari regulasi tersebut.

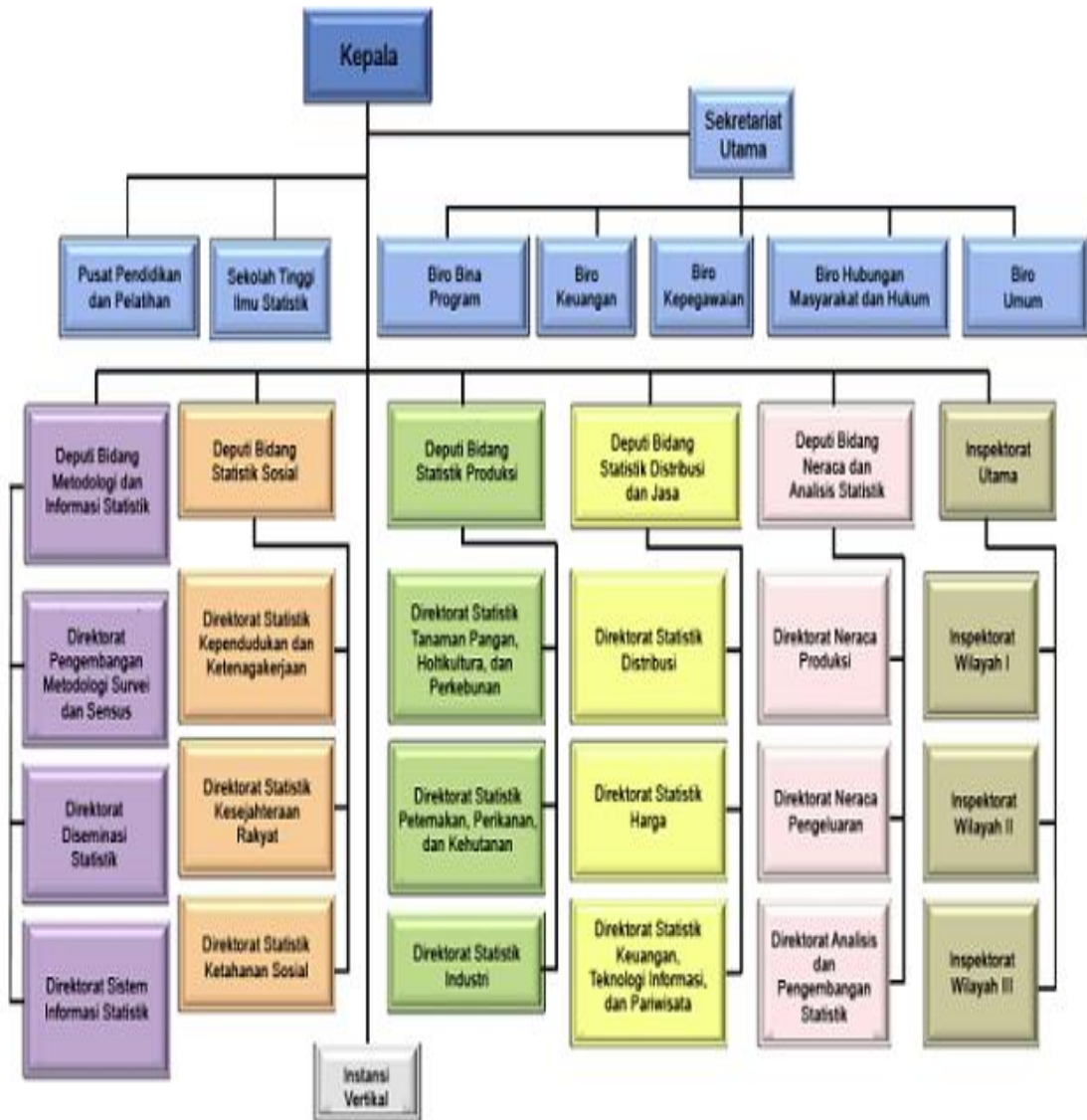
1. Jenis statistik, berdasarkan tujuan pemanfaatannya, terbagi menjadi statistik dasar yang sepenuhnya diorganisir oleh BPS, statistik sektoral yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, dan statistik khusus yang diadakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, atau unsur masyarakat lainnya, baik secara mandiri atau bekerja sama dengan BPS.
2. BPS mengumumkan hasil statistik secara teratur dan transparan melalui Berita Resmi Statistik (BRS), sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui dan memperoleh data yang diperlukan.
3. Tujuan utama adalah menciptakan Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif, dan efisien.

4. Forum Masyarakat Statistik dibentuk sebagai platform untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan data yang dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat, baik melalui sensus atau survei yang dilakukan sendiri maupun melalui data sekunder yang diperoleh dari departemen atau lembaga pemerintah lain.
- b. Mendukung kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah, atau institusi lain dalam upaya membangun sistem statistik nasional.
- c. Mengembangkan serta mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, serta menyediakan layanan dalam bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
- d. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lainnya demi kemajuan statistik Indonesia.

4.3 Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagekeo



Deskripsi

Berdasarkan keputusan kepala badan pusat statistik nomor 121 tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja perwakilan BPS di daerah.

BPS kabupaten nagekeo terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Kasubbag umum
- c. Sekretariat umum
- d. Pusat pendidikan dan pelatihan
- e. Sekolah tinggi ilmu statistik
- f. Deputi bidang metodologi dan informasi statistik
- g. Deputi bidang statistik sosial
- h. Deputi bidang statistik produksi
- i. Deputi bidang statistik distribusi dan jasa
- j. Deputi bidang neraca dan analisis statistik
- k. Inspektorat umum
- l. Instansi vertikal

Berikut adalah penjelasan sedikit mengenai struktur organisasi:

1. Kepala BPS kabupaten nagekeo mempunyai tugas memimpin BPS kabupaten nagekeo sesuai dengan tugas dan fungsi BPS kabupaten nagekeo serta membina aparatur BPS kabupaten nagekeo agar berdaya guna dan berhasil guna.
2. Kasubbag umum mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan

penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

3. Sekretaris umum penanggung jawab dalam bidang administrasi, kesekretariatan, penerangan tugas-tugas organisasi yang bersifat umum, dan menggantikan ketua umum secara fungsional bilamana ketua umum berhalangan sementara atau berhalangan tetap.
4. Pusat pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta teknis dan fungsional.
5. Sekolah tinggi ilmu statistik memiliki kemampuan analisis yang kuat dalam menghadapi data keuangan dan risiko, yang sangat berharga bagi perusahaan perbankan, lembaga keuangan, dan perusahaan asuransi. Mereka dapat berkarir sebagai analis resiko, aktuaris, atau ahli statistic keuangan.
6. Deputi bidang metodologi dan informasi statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik.
7. Deputi bidang statistik sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial.
8. Deputi bidang statistik produksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik produksi.

9. Deputi bidang statistik distribusi dan jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik distribusi dan jasa.
10. Deputi bidang neraca dan analisis statistik bertugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang neraca dan analisis statistik.
11. Inspektorat utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan kementerian PPN/Bappenas.
12. Instansi vertikal bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga Negara dapat di bagi menurut wilayah atau lokasinya. Contoh instansi vertikal adalah polri, polda, polres, dan polsek yang masing-masing memiliki wilayah administrasi dengan cakupan yang berbeda.

4.4 Visi dan Misi Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagekeo

4.4.1 Visi dan Misi Badan Pusat Statistik

Adapun visi badan pusat statistik kabupaten nagekeo ialah sebagai berikut: pelopor data statistik terpercaya untuk semua. Adapun Misi badan pusat statistik kabupaten nagekeo:

1. Memberikan data statistik yang berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan sesuai dengan standar baik nasional maupun internasional.
2. Meningkatkan keberlanjutan sistem statistik nasional melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik.

3. Mengembangkan sumber daya manusia statistik yang profesional, terintegrasi, dan berkomitmen untuk kemajuan perstatistikan.

4.4.2 Nilai-Nilai Inti Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagekeo

Nilai-nilai inti BPS terdiri dari:

a. Profesional

1. Komponen: Memiliki keahlian yang sesuai dengan tugas yang diemban.
2. Efektif: Menghasilkan hasil yang optimal.
3. Efisien: Melaksanakan setiap tugas dengan produktifitas tinggi dan menggunakan sumber daya minimal.
4. Inovatif: Selalu melakukan perbaikan atau pengembangan melalui proses pembelajaran terus-menerus.
5. Sistematis: Memastikan bahwa setiap pekerjaan memiliki urutan proses yang terstruktur, menjadi bagian integral dari pekerjaan yang lain.

b. Integritas

1. Dedikasi: Menunjukkan tingkat pengabdian yang tinggi terhadap profesinya dan institusi yang dikerjakan.
2. Disiplin: Menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
3. Konsisten: Kepatuhan antara perkataan dan tindakan.
4. Terbuka: Menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak.

5. Akun tabel: Bertanggung jawab dan setiap langkahnya diukur dengan hati-hati.

c. Amanah

1. Terpercaya: Menjalankan tugas sesuai dengan peraturan, tidak hanya berlandaskan logika tetapi juga mencakup dimensi spiritual yang mendalam.

2. Jujur: Melakukan semua pekerjaan tanpa menyimpang dari prinsip moralitas.

3. Tulus: Menyelesaikan tugas tanpa adanya konflik kepentingan (baik pribadi, kelompok, atau golongan), dan mendedikasikan semua upaya untuk melindungi kehidupan manusia, dianggap sebagai bentuk ibadah atau pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4. Adil: Menempatkan setiap hal secara adil dan memberikan hak yang seharusnya.

4.4.3 Tugas Fungsi dan Kewenangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagekeo

Tugas Badan Pusat Statistik adalah menjalankan fungsi pemerintahan di sektor statistik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Fungsi BPS kabupaten nagekeo:

1. Perencanaan, penyusunan, dan formulasi kebijakan dalam domain kegiatan statistik.

2. Koordinasi kegiatan statistik di tingkat nasional dan regional.

3. Penetapan dan pelaksanaan statistik dasar.
4. Penetapan sistem statistik nasional.
5. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dalam sektor kegiatan statistik.
6. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dalam aspek perencanaan umum, tata kelola organisasi dan administrasi kepegawaian, keuangan, arsip, humas, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga.

Kewenangan BPS kabupaten nagekeo

1. Penyusunan rencana nasional pada tingkat makro dalam bidang yang bersangkutan.
2. Formulasi kebijakan untuk mendukung pengembangan secara makro di bidang tersebut.
3. Penetapan sistem informasi di sektor tersebut.
4. Penetapan dan pelaksanaan statistik nasional.
5. Pelaksanaan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu dalam sektor kegiatan statistik serta penyusunan pedoman untuk pelaksanaan survei statistik sektoral.

4.5 Kegiatan Badan Pusat Statistik

4.5.1 Pengolahan Data

Tahap pengolahan data memiliki peran krusial dalam menentukan tingkat keakuratan dan ketetapan data statistik yang dihasilkan. BPS menjadi

pelopor dalam pemanfaatan komputer, mulai dari sekitar tahun 1960, sebelumnya menggunakan kalkulator dan alat hitung sipoa. Teknologi komputer yang digunakan selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan. Penggunaan personal computer, yang lebih mudah dan telah diujicobakan, mulai menggantikan mainframe sejak tahun 1980-an di kantor BPS Provinsi, dan di seluruh BPS kabupaten dan kota sejak tahun 1992. Dengan menggunakan data dari personal computer, kantor statistik di daerah dapat dengan cepat memproses data, dimulai dari pengumpulan hingga pengiriman data mentah ke BPS pusat untuk diolah menjadi data nasional.

Pada pengolahan data sensus penduduk tahun 2000, mesin scanner digunakan untuk mempercepat proses. Penggunaan komputer oleh direktorat teknis BPS memberikan dampak positif, tidak hanya meningkatkan kecepatan tetapi juga memotivasi pegawai untuk bertanggung jawab dalam menghasilkan data statistik dan indikator dengan akurasi dan tepat waktu. Penggunaan komputer juga mendukung BPS dalam menyajikan berbagai data statistik dan indikator yang kompleks, seperti kemiskinan, tabel Input-Output (I-O), matriks akuntansi sosial (SAM), dan berbagai indeks komposit dalam waktu yang singkat.

Pada tahun 1993, BPS mulai mengembangkan sistem informasi statistik secara geografis, terutama untuk pengolahan data wilayah sampai tingkat administrasi terkecil yang sebelumnya dilakukan secara manual sejak 1970. Data wilayah ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik daerah yang signifikan dalam perencanaan pembangunan. Dalam pengolahan data, BPS

telah mengembangkan berbagai program aplikasi untuk entri data, editing, validasi, tabulasi, dan analisis dengan berbagai bahasa dan paket komputer. BPS juga bertanggung jawab untuk mengembangkan perangkat lunak komputer serta mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada staf BPS daerah.

Penggunaan infrastruktur teknologi informasi di BPS didasarkan pada tujuan untuk mengikuti perkembangan pemerintah dan kebutuhan dalam pengolahan data statistik, serta memberikan pembaruan kepada publik untuk mendapatkan informasi statistik.

4.5.2 Analisis Data

Analisis data yang berasal dari sensus dan survei BPS dilaksanakan oleh Biro Analisis dan Pengembangan. Agar menghasilkan analisis data yang optimal, BPS juga berkolaborasi dengan para ahli dari perguruan tinggi di Indonesia dan lembaga internasional. Kajian dan analisis data statistik diarahkan untuk memahami serta memberikan estimasi kuantitatif proyeksi berbagai aspek penting dalam pembangunan nasional, guna mendukung perencanaan, penyusunan kebijakan, dan pemantauan. Beberapa hasil analisis tersebut mencakup Analisis Statistik Industri Besar/Sedang, Analisis Pertambangan dan Gas Bumi, Analisis Statistik Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya, Analisis Usaha Perusahaan Perikanan Lautan dan Tambak, Analisis Kependudukan, Analisis Fertilitas, dan lain sebagainya.